



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 35 (tiga puluh lima)
Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI
Hari, Tanggal	: Rabu, 21 September 2022
Pukul	: 14.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Faisol Riza, S.S/Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: 1. Penyesuaian RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran. 2. PMN TA 2023 dan usulan PMN TA 2022
Hadir	: 1. 44 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri BUMN RI, Bapak Erick Thohir; Beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI pada pukul 14.18 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 21 September 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza, S.S

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian BUMN RI Tahun Anggaran 2023 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI No. B/16721/AG.05.02/09/2022 Tanggal 20 September 2022 sebesar Rp.260.400.000.000 (*Dua Ratus Enam Puluh Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*). Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan menyampaikan hasil keputusan ini kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan akhir penetapan.
2. Komisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara Tunai sesuai dengan Rapat Harmonisasi Badan Anggaran sebesar Rp41.297.190.000.000 (*Empat Puluh Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*) ditambah alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi sebesar Rp5.654.000.000.000 (*Lima Triliun Enam Ratus Lima Puluh Empat Miliar Rupiah*).
3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI terkait dengan pemanfaatan alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi sebesar Rp5.654.000.000.000 (*Lima Triliun Enam Ratus Lima Puluh Empat Miliar Rupiah*) agar menyampaikan usulan alokasinya untuk mendapatkan persetujuan dari Komisi VI DPR RI.
4. Komisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara Non Tunai untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.020.960.000.000 (*Tiga Triliun Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
5. Komisi VI DPR RI mendukung usulan tambahan alokasi PMN tahun anggaran 2023 Kementerian BUMN RI sebesar Rp7.880.000.000.000 (*Tujuh Triliun Delapan Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah*) untuk penjaminan KUR, penyelesaian Proyek Strategis Nasional dan Dukungan Keberlangsungan Bisnis BUMN.
6. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.33 WIB.

MENTERI BUMN RI

Ttd.

ERICK THOHIR

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**FAISOL RIZA, S.S
A-33**